



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624

e-Mail : psda_pessel@yahoo.com



Catatan Laporan Keuangan TA 2018



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

P A I N A N - 2019

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, Dinas Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan adalah termasuk dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang kepala dinas (Eselon II/b) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Irigasi, yang membawahi 2 (dua) seksi yaitu :
 1. Seksi Pembangunan Irigasi; dan
 2. Seksi Rehabilitasi dan Operasional Irigasi.
- d. Bidang Sungai, Pantai dan Rawa, yang membawahi 2 (dua) seksi yaitu :
 1. Seksi Sungai dan Pantai
 2. Seksi Drainase dan Rawa
- e. Bidang Bina Teknik dan Konservasi, yang membawahi 2 (dua) seksi yaitu :
 1. Seksi Perencanaan Teknik

2. Seksi Konservasi Sumber Daya Air

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan fungsional

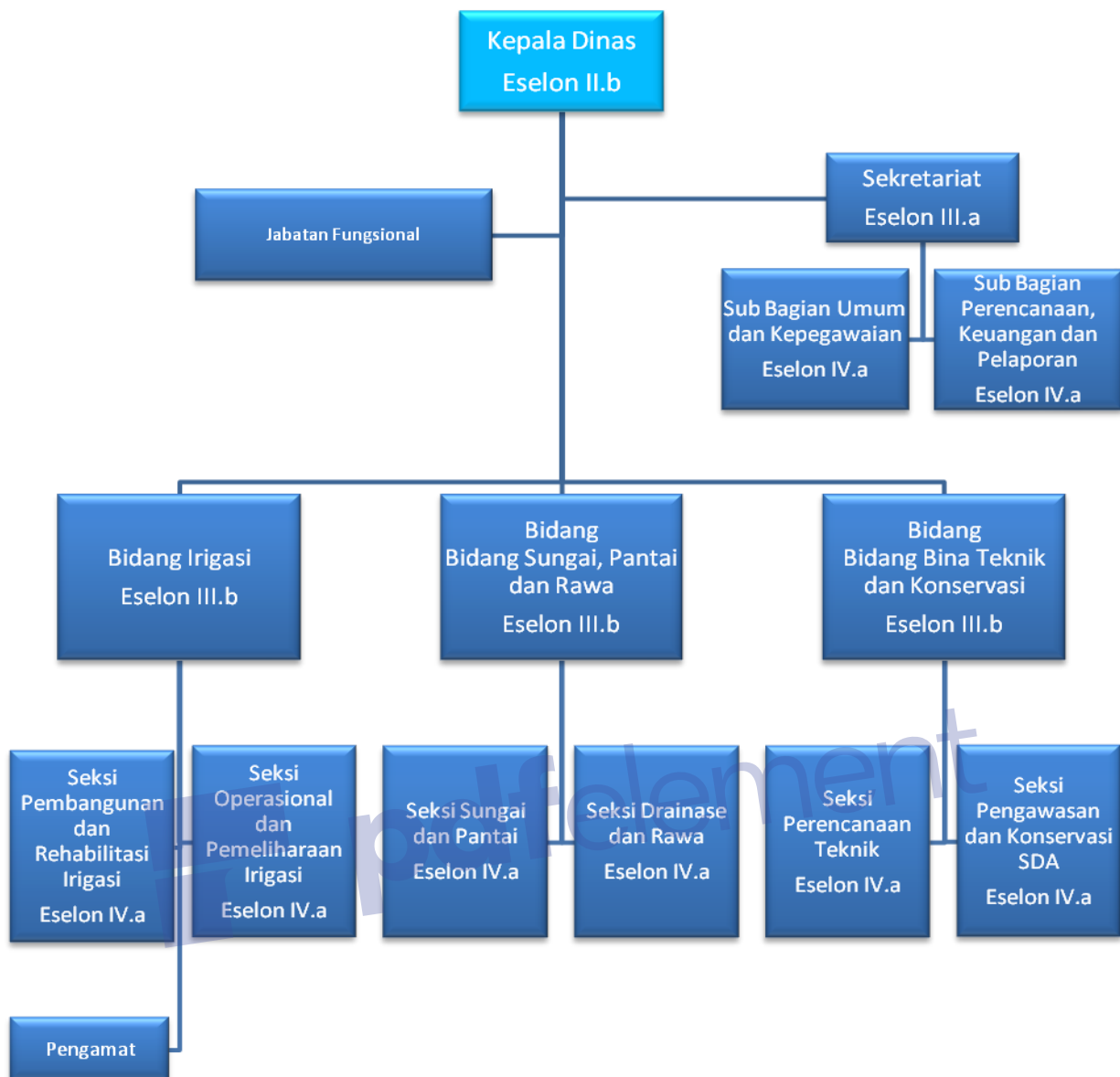
Dinas Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang infrastruktur pengelolaan sumber daya air.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pengelola Sumber Daya Air Pesisir Selatan juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya air.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sumber daya air.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengelolaan sumber daya air; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Dinas Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan yang didasari oleh Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Dinas pengelolaan sumber daya air, dapat dilihat pada Gambar 1.



Masing-masing bagian merupakan sub sistem dari sistem Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air sehingga terbentuk sinergi dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada

publik. Berdasarkan bagan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut terdapat 13 jabatan struktural, yaitu :

- 1 orang Kepala Dinas, Eselon II b.
- 1 orang Sekretaris Eselon III a dan 3 orang Kepala Bidang, Eselon III b.
- 8 orang Kepala Sub Bagian/Seksi, eselon IV a.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No, 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Pengumpulan, Pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.
- c. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang.
- d. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja dinas
- e. Pelaksanaan penyusunan Renstra dinas.
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran dinas.
- g. Penyusunan program kerja tahunan dinas.
- h. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas.
- i. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas.
- j. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan dilingkungan dinas.
- k. Pengkoordinasi dan penghimpunan laporan rencana strategis, kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara, standar operasional pelayanan, pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan daerah, laporan kinerja dan laporan lainnya.
- l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas dinas.
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan dinas.
- c. Menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi laporan hasil kegiatan.
- d. Membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf dilingkungan sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- e. Menyusun usulan rencana umum pengadaan dilingkungan dinas.
- f. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategis dan Rencana Kerja Tahunan dinas.
- g. Menyusun kebijakan umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran sementara dilingkungan dinas serta mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.
- h. Melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan tahunan, Kebijakan umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinas, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Penetapan Kinerja dinas.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan laporan program dan kegiatan dalam lingkup dinas
- j. Menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- k. Mengkumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan pelaporan.
- l. Menyiapkan bahan tentang pelaksanaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- m. Melaksanakan permintaan surat permintaan pembayaran langsung, Tambah Uang dan Ganti Uang.
- n. Mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- o. Mengumpulkan/menyiapkan dokumen dan memproses rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2017 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 33 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- Peaturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Bupati No 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2018 meliputi hal-hal berikut :

- Pendahuluan
- Penjelasan pos-pos Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- Kebijakan Akuntansi yang penting
- Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- Informasi keuangan lainnya.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD.

Sesuai dengan Tugas Pokok dalam Penyelenggaraan pemerintah dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu menyelenggarakan kewenangan daerah urusan bidang pegelolaan sumber daya air dengan beberapa langkah :

1. Memaksimalkan hasil kegiatan dibidang irigasi dan daya guna air, dibidang sungai, pantai, dan rawa, dibidang bina teknik secara menyeluruh
2. Meningkatkan sumber daya aparatur keuangan dan tenaga kepegawaian
3. Meningkatkan mutu pengelolaan sumber daya air
4. Meningkatkan pelayanan umum bidang pengelolaan sumber daya air

2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola APBD tahun anggaran 2018 meliputi hal berikut :

2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Pesisir Selatan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah yang ada antara lain :

- Menginventarisir sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada sesuai dengan kewenangan.
- Melakukan pungutan seluruh sumber – sumber pendapatan dan menyetorkan ke kas daerah.
- Melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan permendagri nomor 21 tahun 2011 sebagai perubahan kedua dari permendagri nomor 13 tahun 2006.
- Memberikan laporan setiap bulan ke Bupati Pesisir Selatan.

2.2. Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran/ belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja.

Penyediaan dana untuk pengelolaan administrasi disesuaikan dengan kebutuhan yang harus disediakan dan dilaksanakan secara efisien serta tetap mengacu pada efektifitas.

- b. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada pengelolaan sumber daya air Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan.

Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mempunyai dampak besar terhadap perekonomian masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan dilaksanakan dengan perhitungan dan rencana yang matang sehingga tingkat efisiensi dan efektifitas dapat dicapai.

- c. Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja, agar pencairan dana selama tahun anggaran 2018 sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Pesisir Selatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan selalu diikuti dengan pengawasan dengan mempedomani rencana yang dibuat dan pelaksanaan yang dilakukan, sehingga kegiatan dapat dipandu kearah rencana yang sudah ditetapkan.

3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Kebijakan Keuangan yang diambil yaitu kebijakan aspek belanja, dimana kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui efisiensi dengan

tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing Program dan Kegiatan Seperti :

- Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran SKPD
- Peningkatan Efisiensi dan Effektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama pada program dan kegiatan yang berdampak besar untuk keperluan masyarakat
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam proses penyusunan DPA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 6 program dan 49 kegiatan dengan total anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 25.553.436.548,- dan jumlah dana setelah perubahan sebesar Rp. 31.579.603.570,-

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

A. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Jumlah dana pada program ini setelah perubahan sebesar Rp. 715.603.400,- dengan realisasi Rp. 678.701.785,- dengan persentase 94,84 %. Program ini terdiri dari 11 kegiatan yang terealisasi sesuai dengan rencana.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja program yang telah ditentukan selengkapnyanya dan diuraikan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 68.400.000,- dan realisasi Rp. 51.542.329,- atau sebesar (75,35%).

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 104.550.000,- dan realisasi Rp. 104.100.000,- atau sebesar (99,57%)

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 86.244.000,- dan realisasi Rp. 86.210.000,- atau sebesar (99,96%)

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 18.250.000,- dan realisasi Rp. 18.230.000,- atau sebesar (99,89%)

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 67.861.900,- dan realisasi Rp. 67.764.000,- atau sebesar (99,86%)

6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 28.160.000,- dan realisasi Rp. 27.934.100,- atau sebesar (99,20%)

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 6.400.000,- dan realisasi Rp. 6.396.000,- atau sebesar (99,94%)

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 15.900.000,- dan realisasi Rp. 15.720.000,- atau sebesar (98,87%)

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 50.122.500,- dan realisasi Rp. 49.122.500,- atau sebesar (98,00%)

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 196.800.000,- dan realisasi Rp. 179.182.856,- atau sebesar (91,05%)

11. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 72.915.000,- dan realisasi Rp. 72.500.000,- atau sebesar (99,43%)

B. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Jumlah dana pada program ini setelah perubahan sebesar Rp. 864.718.650,- dengan realisasi Rp. 824.823.568,- dengan persentase 95,39 %. Program ini terdiri dari 6 kegiatan yang terealisasi sesuai dengan rencana. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja program yang telah ditentukan selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

1. Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 34.500.000,- dan realisasi Rp. 34.375.000,- atau sebesar (99,64%)

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 354.866.000,- dan realisasi Rp. 354.211.000,- atau sebesar (99,82%)

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 400.352.650,- dan realisasi Rp. 362.575.568,- atau sebesar (90,56%)

4. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 75.000.000,- dan realisasi Rp. 73.662.000,- atau sebesar (98,22%).

C. Program : Saluran Drainase/Gorong-Gorong.

Jumlah dana pada program ini setelah perubahan sebesar Rp. 3.630.432.235,- dengan realisasi Rp. 2.978.107.100,- dengan persentase 82,03 %. Program ini terdiri dari 8 kegiatan yang terealisasi sesuai dengan rencana terdiri dari :

1. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 59.146.400,- dan realisasi Rp. 57.146.400,- atau sebesar (96,62%).

2. Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 2.462.462.000,- dan realisasi Rp. 2.415.522.000,- atau sebesar (98,09%).

3. Pembuatan Database Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Tahap II).

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 88.700.000,- dan realisasi Rp. 84.460.300,- atau sebesar (95,22%).

4. Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman.
Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 336.789.535,- dan realisasi Rp. 334.588.600,- atau sebesar (99,35%).
5. Kelanjutan Drainase Batang Painan Kec. IV Jurai (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 215.000.000,- dan realisasi Rp. 11.825.500,- atau sebesar (5,50%).
6. Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 210.000.000,- dan realisasi Rp. 9.447.000,- atau sebesar (4,50%).
7. Lanjutan Pemasangan Parit Miring (Drainase) Depan Paud Kasih Bunda, Nagari Bungo Pasang Salido (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 200.000.000,- dan realisasi Rp. 8.183.000,- atau sebesar (4,09%).
8. Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar (Luncuran 2017)
Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 58.334.300,- dan realisasi Rp. 56.934.300,- atau sebesar (97,60%).

D. Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

Jumlah dana pada program ini setelah perubahan sebesar Rp. 17.250.670.135,- dengan realisasi Rp. 15.313.013.760,- dengan persentase 88,77 %. Program ini terdiri dari 12 kegiatan yang terealisasi sesuai dengan rencana terdiri dari :

1. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 4.301.372.000,- dan realisasi Rp. 3.971.682.000,- atau sebesar (92,34%).

2. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 2.834.514.000,- dan realisasi Rp. 2.712.865.300,- atau sebesar (95,71%).

3. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 620.502.000,- dan realisasi Rp. 605.244.150,- atau sebesar (97,54%).

4. Pembaruan Database Irigasi.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 88.700.000,- dan realisasi Rp. 75.141.000,- atau sebesar (84,71%).

5. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Luncuran DAK 2013).

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 653.826.353,- dan realisasi Rp. 647.311.000,- atau sebesar (99,00%).

6. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK).

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 7.043.753.000,- dan realisasi Rp. 6.419.583.000,- atau sebesar (91,14%).

7. Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 286.274.932,- dan realisasi Rp. 258.682.000,- atau sebesar (90,36%).

8. Operasional Irigasi.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 624.000.000,- dan realisasi Rp. 292.000.000,- atau sebesar (46,79%).

9. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN)

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 332.200.000,- dan realisasi Rp. 49.098.101,- atau sebesar (14,78%).

10. Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenag.

Sungai Tunu Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 175.000.000,- dan realisasi Rp. 7.864.000,- atau sebesar (4,49%).

11. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Penunjang DAK dan Penyusunan Geospasial Daerah Irigasi).

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 143.670.000,- dan realisasi Rp. 126.685.359,- atau sebesar (88,18%).

12. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Luncuran DAK 2017).

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 146.857.850,- dan realisasi Rp. 146.857.850,- atau sebesar (100,00%).

E. Program : Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air.

Jumlah dana pada program ini setelah perubahan sebesar Rp. 833.884.600,- dengan realisasi Rp. 642.146.800,- dengan persentase 77,01%. Program ini terdiri dari 4 kegiatan yang terealisasi sesuai dengan rencana terdiri dari :

1. Monitoring Evaluasi Pelaporan.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 28.856.000,- dan realisasi Rp. 27.496.600,- atau sebesar (95,29%).

2. Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 97.964.000,- dan realisasi Rp. 90.018.000,- atau sebesar (91,89%).

3. Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 66.050.000,- dan realisasi Rp. 63.248.000,- atau sebesar (95,76%).

4. Dokumen Lingkungan.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 641.014.600,- dan realisasi Rp. 461.384.200,- atau sebesar (71,98%).

F. Program Pengendalian banjir.

Jumlah dana pada program ini setelah perubahan sebesar Rp. 8.284.294.550,- dengan realisasi Rp. 7.742.587.094,- dengan persentase 93,46%. Program ini terdiri dari 8 kegiatan yang terealisasi sesuai dengan rencana terdiri dari :

1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 5.390.744.000,- dan realisasi Rp. 5.142.566.944,- atau sebesar (95,40%).

2. Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 1.732.981.000,- dan realisasi Rp. 1.692.588.750,- atau sebesar (97,67%).

3. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 550.286.500,- dan realisasi Rp. 546.279.350,- atau sebesar (99,27%).

4. Pembuatan Database Sungai, Pantai dan Rawa.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 108.675.000,- dan realisasi Rp. 102.769.000,- atau sebesar (94,57%).

5. Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenag. Pelangai Kaciak Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018).

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 150.000.000,- dan realisasi Rp. 8.628.000,- atau sebesar (5,75%).

6. Pengamanan Tebing Sungai Batang Bayang Kenag. Kubang Kec. Bayang (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018).

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 100.000.000,- dan realisasi Rp. 5.488.000,- atau sebesar (5,49%).

7. Penahanan Tebing Jembatan Gantung Muaro Bayang Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Tahun 2017).

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 195.250.000,- dan realisasi Rp. 189.309.000,- atau sebesar (96,96%).

8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Luncuran 2017).

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 56.358.050,- dan realisasi Rp. 54.958.050,- atau sebesar (97,52%).



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab Pesisir Selatan mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 37.519.775.984,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.046.684.070,- dengan persentase 90,74% dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung dengan jumlah pagu sebesar Rp. 4.514.313.864,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.465.913.413,- atau 98,93%.
- Belanja Langsung dengan jumlah Pagu sebesar Rp. 31.579.603.570,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.179.380.107,- atau 89,23%.

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1. Pendapatan

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, realisasi Pendapatan Negara dan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Negara dengan rincian sebagai berikut :

PPN	: sebesar Rp. 2.190.309.801,-
PPH-21	: sebesar Rp. 131.548.692,-
PPH-22	: sebesar Rp. 4.660.933,-
PPH-23	: sebesar Rp. 4.486.996,-
PPH 4 (2) pajak konstruksi	: sebesar Rp. 447.557.212,-

- Pendapatan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Pajak Hotel	: sebesar Rp.	0,-
Pajak Restoran	: sebesar Rp.	5.127.750,-

1.2. Belanja

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi (Perbup No. 27 Tahun 2014 Ttg: Kebijakan akuntansi Pemdakab. Pessel) yaitu : Belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Pengertian dan jenis belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah.
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun anggaran).
- c. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi belanja operasi dan belanja modal pada Tahun Anggaran 2018 tercatat sebesar Rp. 28.179.380.107,- dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 31.579.603.570,- tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I. BELANJA LANGSUNG	31,579,603,570.00	28,179,380,107.00	85.50
II. BELANJA OPERASI	13,449,896,135.00	12,189,894,763.00	82.24
II. 1. Belanja Pegawai	1,600,900,000.00	1,140,400,000.00	71.23
II. 2. Belanja Barang dan Jasa	11,848,996,135.00	11,049,494,763.00	93.25
III. BELANJA MODAL	18,129,707,435.00	15,989,485,344.00	88.76
III. 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127,900,000.00	102,118,700.00	79.84
III. 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75,000,000.00	73,662,000.00	98.22
III. 3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	17,926,807,435.00	15,813,704,644.00	88.21

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Pesisir Selatan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang membantu kelancaran pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 715.603.400,- dengan realisasi Rp. 678.701.785,- dengan persentase 94,84 %.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan agar dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2018 Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 864.718.650,- dengan realisasi Rp. 824.823.568,- dengan persentase 95,39 %.

c. Program Pembangunan Saluran Drainase (Gorong-gorong)

Program ini diselenggarakan dalam rangka membangun saluran drainase. Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 3.630.432.235,- dengan realisasi Rp. 2.978.107.100,- dengan persentase 82,03 %.

d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan jaringan pengairan lainnya.

Program ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan fungsi normalisasi sungai, peningkatan dan pengelolaan fungsi jaringan irigasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa. Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 17.250.670.135,- dengan realisasi Rp. 15.313.013.760,- dengan persentase 88,77 %.

e. Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan embung, penampung air lainnya serta perlengkapannya. Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 833.884.600,- dengan realisasi Rp. 642.146.800,- dengan persentase 77,01%.

f. Program Pengendalian banjir

Program ini dilakukan dalam pemeliharaan bantaran tanggul sungai, pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir, pembersihan kali/sungai, pengamanan muara dan sungai, dan Prasarana pengaman pantai. Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 8.284.294.550,- dengan realisasi Rp. 7.742.587.094,- dengan persentase 93,46%.

2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat beberapa permasalahan, yaitu :

- ✓ Tingginya curah hujan yang mengakibatkan meningkatnya debit air sungai yang merupakan lokasi utama pekerjaan menyebabkan terkendalanya beberapa pelaksanaan kegiatan.
 - ✓ Tidak bebasnya lokasi pekerjaan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
 - ✓ Adanya perbedaan antara jenis pekerjaan dengan judul pekerjaan yang diajukan
- Dari permasalahan-permasalahan yang dialami dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran, beberapa solusi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- ✓ Menambah waktu pelaksanaan pekerjaan (addendum pekerjaan) untuk kegiatan yang terkendala cuaca dan akses jalan agar pelaksanaan mencapai target yang diinginkan.
- ✓ Memindahkan lokasi pekerjaan ketempat yang telah bebas dan melakukan revisi desain (melaksanakan addendum pekerjaan) untuk kegiatan yang terkendala belum bebasnya lokasi kegiatan agar kegiatan tetap berjalan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati No 27 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2018 adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO),

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka pada tahun 2018 ini, Laporan keuangan yang dibuat adalah berbasis akrual . Berdasarkan paper akuntansi pemerintahan karya Erichenko Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, & relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, & politik.

Pengaplikasian accrual basis dalam Akuntansi Sektor Publik adalah untuk menentukan cost of services & charging for services, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost). Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan,

pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per

masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan. Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi memiliki untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen.

I. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Kontruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2018, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah. Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan / pengadaan tahun anggaran 2018 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan, dan telah memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini mengakibatkan telah ditetapkannya umur/masa manfaat atas aset- aset tersebut dan metode penyusutan yang akan digunakan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dibawah ini disampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut :

1.1. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Negara dan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

PPN	: sebesar Rp. 2.190.309.801,-
PPh-21	: sebesar Rp. 131.548.692,-
PPh-22	: sebesar Rp. 4.660.933,-
PPh-23	: sebesar Rp. 4.486.996,-
PPh 4 (2) pajak konstruksi	: sebesar Rp. 447.557.212,-

Pendapatan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Pajak Hotel	: Nihil
Pajak Restoran	: sebesar Rp. 5.127.750,-

1.2 Realisasi Belanja

1.2.1 Belanja Tidak Langsung dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai :
 - Gaji dan Tunjangan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 4.514.313.864,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.465.913.413,- atau 98,93 % dari jumlah pagu anggaran. Sisa gaji dan tunjangan sebesar Rp. 48.400.451,-
 - Tambahan Penghasilan PNS dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 1.425.763.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.401.390.550,- atau 98,29 % dari jumlah pagu anggaran. Sisa tambahan penghasilan PNS sebesar Rp. 24.373.000,-
 - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dengan Jumlah Pagu anggaran Rp. 95.000,- dengan realisasi Rp. 0,-

Dari data di atas diketahui bahwa terdapat sisa anggaran Belanja Pegawai Tidak langsung sebesar Rp. 72.868.451,- dari anggaran sebesar Rp. 5.940.172.414,- dan realisasinya sebesar Rp. 5.867.303.963,-

Hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran dari gaji dan tunjangan sebesar Rp. 48.400.451,- dan sisa tambahan penghasilan PNS sebesar Rp. 24.373.000,-. Terdapatnya sisa anggaran untuk belanja pegawai tidak langsung, disebabkan oleh karena adanya PNS yang pindah dan adanya PNS yang pensiun.

1.2.2 Belanja Langsung

Untuk Belanja Pegawai langsung terdapat sisa sebesar Rp 460.500.000,- yang terdiri dari sisa Honorarium PNS sebesar Rp. 128.050.000,-, honorarium non PNS sebesar Rp. 332.450.000,-.

- 1.3. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 11.848.996.135,- terealisasi sebesar Rp 11.049.494.763,- dengan persentase sebesar 93,25 %

Adapun rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada Tabel 3.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA BARANG DAN JASA	11,848,996,135	11,049,494,763	93.25
Belanja Bahan Pakai Habis	181,370,500	138,260,750	76.23
Belanja alat tulis kantor	101,518,500	88,455,500	87.13
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,400,000	1,396,000	99.71
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000	1,800,000	100.00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8,244,000	8,210,000	99.59
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	68,408,000	38,399,250	56.13
Belanja Bahan/Material	25,000,000	24,348,000	97.39
Belanja bahan baku bangunan	25,000,000	24,348,000	97.39
Belanja Jasa Kantor	90,905,000	67,262,329	73.99
Belanja telepon	4,200,000	529,388	12.60
Belanja air	7,200,000	5,585,600	77.58
Belanja listrik	57,000,000	45,427,341	79.70
Belanja surat kabar/majalah	3,900,000	3,870,000	99.23

Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	6,605,000	0	0.00
Belanja Publikasi	12,000,000	11,850,000	98.75
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	309,352,650	271,575,568	87.79
Belanja Jasa Service	45,200,000	45,012,350	99.58
Belanja Penggantian Suku Cadang	71,950,000	71,670,599	99.61
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	168,955,650	144,588,669	85.58
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	23,247,000	10,303,950	44.32
Belanja Cetak dan Penggandaan	55,559,400	36,120,500	65.01
Belanja cetak	17,402,000	10,824,000	62.20
Belanja Penggandaan	38,157,400	25,296,500	66.30
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	120,600,000	75,300,000	62.44
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	120,600,000	75,300,000	62.44
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,000,000	9,997,000	99.97
Belanja sewa tenda	10,000,000	9,997,000	99.97
Belanja Makanan dan Minuman	60,337,500	49,612,500	82.22
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14,600,000	13,840,000	94.79
Belanja makanan dan minuman rapat	42,747,500	34,442,500	80.57
Belanja makanan dan minuman tamu	1,375,000	1,330,000	96.73
Belanja makanan dan minuman pelatihan	1,615,000	0	0.00
Belanja Perjalanan Dinas	770,475,000	595,669,616	77.31
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	366,700,000	263,730,000	71.92
Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	103,325,000	81,543,000	78.92
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	300,450,000	250,396,616	83.34
Belanja Pemeliharaan	10,108,896,085	9,716,962,500	96.12
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18,250,000	18,230,000	99.89
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	124,866,000	124,866,000	100.00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9,965,780,085	9,573,866,500	96.07
Belanja Jasa Konsultansi	60,000,000	59,386,000	98.98
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60,000,000	59,386,000	98.98
Belanja Jasa Pihak Ketiga	56,500,000	5,000,000	8.85
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50,000,000	5,000,000	10.00
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	6,500,000	0	0.00

Persentase serapan realisasi belanja barang dan jasa terserap dengan cukup baik, terencana dan terselenggara sesuai dengan target kinerjanya. Hanya pada beberapa belanja saja terealisasi agak lebih rendah atau tidak jadi dilaksanakan seperti pada Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur, Belanja makanan dan minuman pelatihan dan Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi yaitu 0,00 % dikarenakan batalnya pelatihan tersebut. Belanja telepon yaitu 12,60 %, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor yaitu 44,32 %, Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai yaitu 10 %. Hal ini menunjukkan target kinerja dapat tercapai dengan baik dengan melakukan efisiensi dan mengurangi pengeluaran belanja yang tidak perlu dibiayai.

1.4. Belanja Modal

Untuk belanja modal Dinas PSDA menganggarkan Rp. 18.129.707.435,- dan terealisasi sebesar Rp 15.989.485.344 ,-. Persentase 88,19%.

Rincian belanja modal dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Rincian Belanja Modal

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	4,150,000	4,150,000	100.00
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	4,150,000	4,150,000	100.00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	27,000,000	15,450,000	57.22
Belanja modal Pengadaan Meubelair	27,000,000	15,450,000	57.22
Belanja modal Pengadaan Komputer	57,500,000	44,375,000	77.17
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	34,500,000	34,375,000	99.64
Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	23,000,000	10,000,000	43.48
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	39,250,000	38,143,700	97.18
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	35,750,000	34,860,100	97.51
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	3,500,000	3,283,600	93.82
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	75,000,000	73,662,000	98.22
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	75,000,000	73,662,000	98.22
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	10,767,651,203	10,001,758,150	92.89
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	10,767,651,203	10,001,758,150	92.89
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	624,214,600	444,584,200	71.22

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	624,214,600	444,584,200	71.22
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	2,886,624,000	2,557,658,094	88.60
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	2,886,624,000	2,557,658,094	88.60
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	175,000,000	7,864,000	4.49
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar	175,000,000	7,864,000	4.49
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	3,473,317,632	2,801,840,200	80.67
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor.	3,473,317,632	2,801,840,200	80.67
TOTAL	18,129,707,435	15,989,485,344	88.19

Neraca

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 adalah 0 (nol) dan Sisa UYHD tahun 2018 sebesar Rp. 51.328.990,- telah disetorkan ke kas daerah pada akhir tahun 2018. Jumlah total pengembalian Dinas PSDA ke kas daerah pada akhir tahun 2018 adalah Rp. 80.546.765,- (delapan puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) terdiri dari:

NO	TGL SETOR	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA/URAIAN	JUMLAH
1	28/02/2018	01.18 Pengembalian Kelebihan Uang Tiket Perjalanan Dinas ke Jakarta an. Devitra, Samsunardini. ST, MM, pada kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah Dinas PSDA Pessel	291,804.00
2	13/03/2018	Pengembalian Tunajangan Kinerja An.Suhatri dan Surianto ke Kasda Dinas PSDA Kab.Pesisir Selatan.	2,526,250.00
3	04/06/2018	16.33 Pengembalian dana TU Keg.Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Pemukiman Dinas PSDA Kab.Pessel.	141,000.00
4	04/06/2018	16.33 Pengembalian dana TU Keg.Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Pemukiman Dinas PSDA Kab.Pessel.	75,000.00
5	02/05/2018	28.07 Pengembalian sisa uang panjar TU keg. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Dinas PSDA Kab.Pesisir Selatan.	4,725.00
6	29/06/2018	28.07 Pengembalian sisa uang panjar TU keg. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Dinas PSDA Kab.Pesisir Selatan.	66,900.00

7	29/06/2018	24.15 Pengembalian sisa panjar dana TU Keg.Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	271,250.00
8	31/07/2018	24.15 Pengembalian sisa panjar dana TU Keg.Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	1,053,200.00
9	08/11/2018	26.21 Pengembalian GU Keg. Dokumen Lingkungan Dinas PSDA Kab. Pessel	2,512,000.00
10	26/11/2018	28.07 Pengembalian sisa uang panjar TU keg. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Dinas PSDA Kab.Pesisir Selatan.	35,950.00
11	26/11/2018	28.07 Pengembalian sisa uang panjar TU keg. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Dinas PSDA Kab.Pesisir Selatan.	64,500.00
12	04/12/2018	16.33 Pengembalian dana TU Keg.Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Pemukiman Dinas PSDA Kab.Pessel.	806,000.00
13	05/12/2018	26.10 Pengembalian GU Keg. Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air Dinas PSDA Kab. Pessel	1,500,000.00
14	05/12/2018	01.07 Pengembalian LS Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas PSDA Kab. Pessel	1,200,000.00
15	06/12/2018	24.54 Pengembalian GU biaya perjalanan dinas An.Devitra,S.ST.MM ke Jakarta SPT No.54/SPT/SKR/PSDA-PS/III-2018 tgl 5 maret 2018 keg.DAK dinas PSDA Pessel.	7,585,689.00
16	06/12/2018	24.54 Pengembalian GU biaya perjalanan dinas An.Ir.H.Doni Gusrizal,MM ke Jakarta SPT No.54/SPT/SKR/PSDA-PS/III-2018 tgl 5 maret 2018 keg.DAK dinas PSDA Pessel.	6,191,032.00
17	06/12/2018	Pengembalian Tunjangan Kinerja ke Kasda Dinas PSDA Kab.Pesisir Selatan.	414,150.00
18	20/12/2018	01.07 Pengembalian LS Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas PSDA Kab. Pessel	4,200,000.00
19	31/12/2018	16.33 Pengembalian sisa dana TU Keg.Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Pemukiman Dinas PSDA Kab.Pessel.	173,000.00
20	31/12/2018	28.07 Pengembalian sisa uang panjar TU keg. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Dinas PSDA Kab.Pesisir Selatan.	40,825.00
21	31/12/2018	24.15 Pengembalian sisa panjar dana TU Keg.Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	64,500.00

22	31/12/2018	Penyetoran Sisa UP Tahun 2018 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	51,328,990.00
		JUMLAH	80,546,765.00

URAIAN	TAHUN 2018 (Rp.)	TAHUN 2017 (Rp.)
Persediaan	24.141.000,00	47.323.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 desember 2017 sebesar Rp. 47.323.000,- dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 24.141.000,-.

No.	URAIAN	2018	2017
1	2	3	4
	ASET TETAP		
1	Tanah	13,966,179,641	13,966,179,641
2	Peralatan dan Mesin	1,110,348,285	2,975,786,366
3	Gedung dan Bangunan	2,983,285,138	3,849,608,426
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	174,549,582,839	197,235,758,446
5	Aset Tetap Lainnya	10,135,490	10,135,490
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1,872,925,385	1,721,321,506
7	Akumulasi Penyusutan	0	-41,240,531,681
	TOTAL	194,492,456,778	178,518,258,194

Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

Adapun laporan operasional yang dihasilkan SKPD pada tahun 2018 adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 DAN 2017

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
<u>PENDAPATAN - LO</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	268.750,00	0.00	268,750.00	100.00
Pajak Restoran - LO	268.750,00	0.00	268,750.00	100.00
Restoran - LO	268.750,00	0.00	268,750.00	100.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.900.000,00	0.00	1,900,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.900.000,00	0.00	1,900,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.. -LO	1.900.000,00	0.00	1,900,000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	2.168.750,00	0.00	2,168,750.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	2.168.750,00	0.00	2,168,750.00	100.00
<u>BEBAN</u>				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	5.867.303.963,00	0.00	5,867,303,963.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	4.465.913.413,00	0.00	4,465,913,413.00	100.00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	3.453.111.795,00	0.00	3,453,111,795.00	100.00
Tunjangan Keluarga - LO	359.138.914,00	0.00	359,138,914.00	100.00
Tunjangan Jabatan - LO	147.090.000,00	0.00	147,090,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	164.010.000,00	0.00	164,010,000.00	100.00
Tunjangan Beras - LO	206.614.260,00	0.00	206,614,260.00	100.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	3.054.812,00	0.00	3,054,812.00	100.00
Pembulatan Gaji - LO	55.842,00	0.00	55,842.00	100.00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	97.953.400,00	0.00	97,953,400.00	100.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - LO	7.069.956,00	0.00	7,069,956.00	100.00
Iuran Jaminan Kematian (JKM) -LO	27.814.434,00	0.00	27,814,434.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	1.401.390.550,00	0.00	1,401,390,550.00	100.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	1.401.390.550,00	0.00	1,401,390,550.00	100.00
Beban Barang dan Jasa	12.189.894.763,00	0.00	12,189,894,763.00	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	138.260.750,00	0.00	138,260,750.00	100.00
Beban Persediaan alat tulis kantor	88.455.500,00	0.00	88,455,500.00	100.00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.396.000,00	0.00	1,396,000.00	100.00
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	0.00	1,800,000.00	100.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.210.000,00	0.00	8,210,000.00	100.00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	38.399.250,00	0.00	38,399,250.00	100.00
Beban Persediaan Bahan/ Material	24.348.000,00	0.00	24,348,000.00	100.00

Beban Persediaan bahan baku bangunan	24.348.000,00	0.00	24,348,000.00	100.00
Beban Jasa Kantor	67.262.329,00	0.00	67,262,329.00	100.00
Beban Jasa telepon	529.388,00	0.00	529,388.00	100.00
Beban Jasa air	5.585.600,00	0.00	5,585,600.00	100.00
Beban Jasa listrik	45.427.341,00	0.00	45,427,341.00	100.00
Beban Jasa surat kabar/majalah	3.870.000,00	0.00	3,870,000.00	100.00
Beban Jasa Publikasi	11.850.000,00	0.00	11,850,000.00	100.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	271.575.568,00	0.00	271,575,568.00	100.00
Beban Jasa Service	45.012.350,00	0.00	45,012,350.00	100.00
Beban Penggantian Suku Cadang	71.670.599,00	0.00	71,670,599.00	100.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	144.588.669,00	0.00	144,588,669.00	100.00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	10.303.950,00	0.00	10,303,950.00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	36.120.500,00	0.00	36,120,500.00	100.00
Beban Cetak	10.824.000,00	0.00	10,824,000.00	100.00
Beban Penggandaan	25.296.500,00	0.00	25,296,500.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	75.300.000,00	0.00	75,300,000.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	75.300.000,00	0.00	75,300,000.00	100.00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.997.000,00	0.00	9,997,000.00	100.00
Beban sewa tenda	9.997.000,00	0.00	9,997,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	49.612.500,00	0.00	49,612,500.00	100.00
Beban makanan dan minuman harian pegawai	13.840.000,00	0.00	13,840,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman rapat	34.442.500,00	0.00	34,442,500.00	100.00
Beban makanan dan minuman tamu	1.330.000,00	0.00	1,330,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	595.669.616,00	0.00	595,669,616.00	100.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	263.730.000,00	0.00	263,730,000.00	100.00
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	81.543.000,00	0.00	81,543,000.00	100.00
Beban perjalanan dinas Luar Daerah Luar Propinsi	250.396.616,00	0.00	250,396,616.00	100.00
Beban Pemeliharaan	9.716.962.500,00	0.00	9,716,962,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.230.000,00	0.00	18,230,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	124.866.000,00	0.00	124,866,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.573.866.500,00	0.00	9,573,866,500.00	100.00
Beban Jasa Konsultasi	59.386.000,00	0.00	59,386,000.00	100.00
Beban Jasa Konsultasi Pengawasan	59.386.000,00	0.00	59,386,000.00	100.00
Honorarium PNS	470.600.000,00	0.00	470,600,000.00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	192.400.000,00	0.00	192,400,000.00	100.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.300.000,00	0.00	18,300,000.00	100.00
Honorarium Pengawas	24.000.000,00	0.00	24,000,000.00	100.00
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	36.050.000,00	0.00	36,050,000.00	100.00
Honorarium Tim DED	199.850.000,00	0.00	199,850,000.00	100.00
Honorarium Non PNS	669.800.000,00	0.00	669,800,000.00	100.00
Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	669.800.000,00	0.00	669,800,000.00	100.00
Beban Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	0.00	5,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	0.00	5,000,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	18.057.198.726,00	0.00	18,057,198,726.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(18.055.029.976,00)	0.00	(18,055,029,976.00)	100.00

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2018 Dan 2017

URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	178.551.298.959,76	178.551.298.959,76
RK PPKD	34.044.515.320,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	212.595.814.279,76	178.551.298.959,76

Pada tahun 2018, ekuitas awal sebesar Rp. 178.551.298.959,76 ditambah dengan RK PPKD nihil dikurang dengan Surplus /defisit LO sebesar nihil sehingga menghasilkan ekuitas akhir sebesar Rp. 212.595.814.279,76.

pdfelement

B A B VI P E N U T U P

6.1. Kesimpulan

Tidak ada hambatan /kendala yang krusial dalam pelaksanaan anggaran SKPD tahun 2018. Hanya ada sedikit keterlambatan proses pencairan dana APBD yang berkaitan dengan mutasi pengelola keuangan daerah, sehingga memerlukan pemahaman lebih lanjut dari pihak – pihak terkait.

6.2. Saran

1. Peningkatan anggaran dimasa yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air yang lebih baik.
2. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan tentang Aturan Pengelolaan Keuangan Daerah

Painan, Januari 2019

KEPALA DINAS

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. Doni Gusrizal, M.M.

NIP. 19641106 199703 1 001

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah **Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan** per 31 Desember 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana Posisi Keuangan Tahun 2017 adalah sbb :

- Anggaran	Rp	37.519.775.984,-
- Jumlah SP2D	Rp.	34.127.230.835,-
- Jumlah Realisasi	Rp.	34.046.684.070,-
- Sisa UYHD	Rp	51.328.990,-
- Contra Post	Rp	29.217.775,-

Painan, Januari 2019

**KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. Doni Gusrizal, M.M.

NIP. 19641106 199703 1 001